

KATA PENGANTAR

Dengan target pencapaian Visi *"terwujudnya Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera"*, Sekretariat Daerah berupaya untuk mencapai misi-misi atas peningkatan Akuntabilitas, Transparansi, Modernisasi Birokrasi, serta melakukan reformasi birokrasi baik secara individual melalui peningkatan profesionalitas serta melakukan reformasi secara kelembagaan.

Atas dasar itu, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam ini telah dapat disusun dengan asas mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan Kota Batam yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) atas semua Kebijakan, Program dan Sasaran yang dibuat pada Sekretariat Daerah Kota Batam sehingga mampu mencapai Visi-Misi Pembangunan Kota Batam yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Kota Batam 2021-2026.

Selanjutnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini disadari masih banyak kekurangan, sehingga kami sangat menerima kritikan dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dikemudian hari.

Batam, 19 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA



H. JEFRIDIN, M.Pd
Pembina Utama Madya
Nip. 19681225 199802 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI..... II

DAFTAR TABELIII

DAFTAR GAMBAR.....III

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2024..... 9

2.1 EVALUASI TERHADAP RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM 9

TABEL 2. 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II KOTA BATAM
..... 19

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH 22

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PERANGKAT DAERAH 22

1.1 PERUBAHAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024..... 22

1.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN..... 36

BAB IV PENUTUP 83

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam s/d Semester 1 Tahun 2024 11

TABEL 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Sampai dengan Triwulan II Kota Batam 19

TABEL 3. 1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan..... 23

TABEL 3. 2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024..... 41

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1 Tahapan Penyusunan Rencana Kerja2

GAMBAR 1. 2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Batam. Rencana Kerja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah dalam periode tahun anggaran 2024.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah yang tentunya harus menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan RKPD Kota Batam.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu sesuai Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

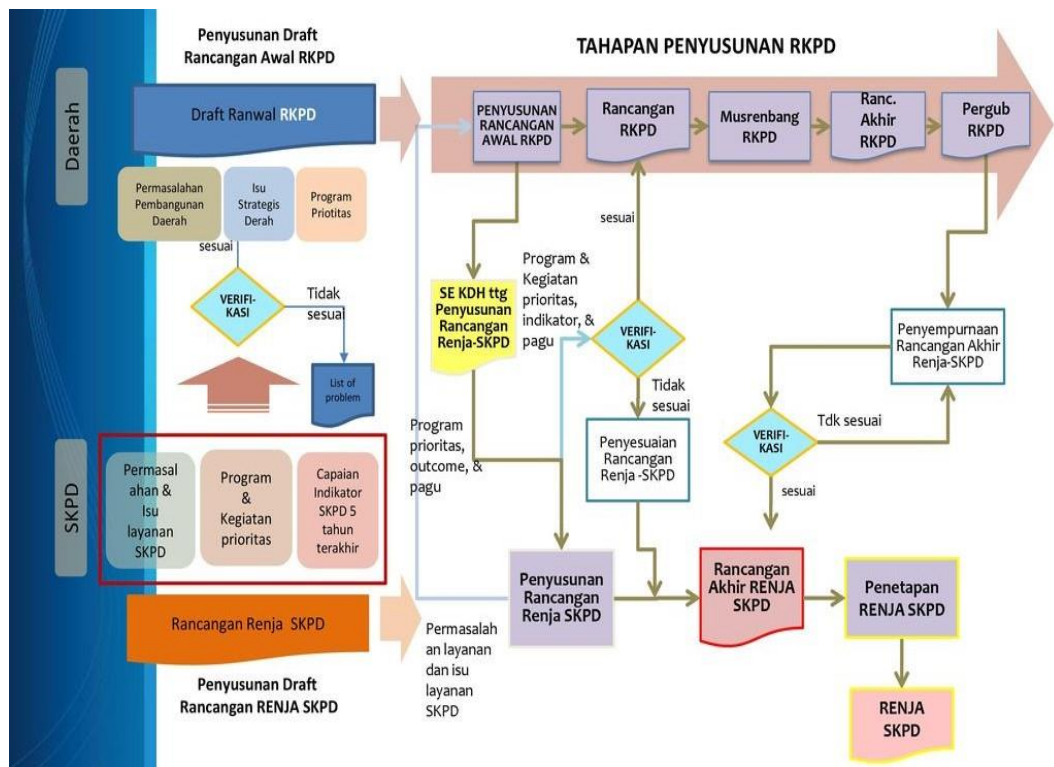
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka*

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa rencana dan target capaian program dan kegiatan selama 5 (lima) tahunan dijabarkan kembali kedalam rencana kerja untuk masa kerja 1 (satu) tahunan dengan memperhatikan dinamika yang berkembang serta permasalahan yang ada dilingkungan Birokrasi dan Masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kota Batam menyusun Rencana Kerja 1 (satu) tahunan untuk tahun 2024 berdasarkan pedoman dan aturan yang berlaku.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

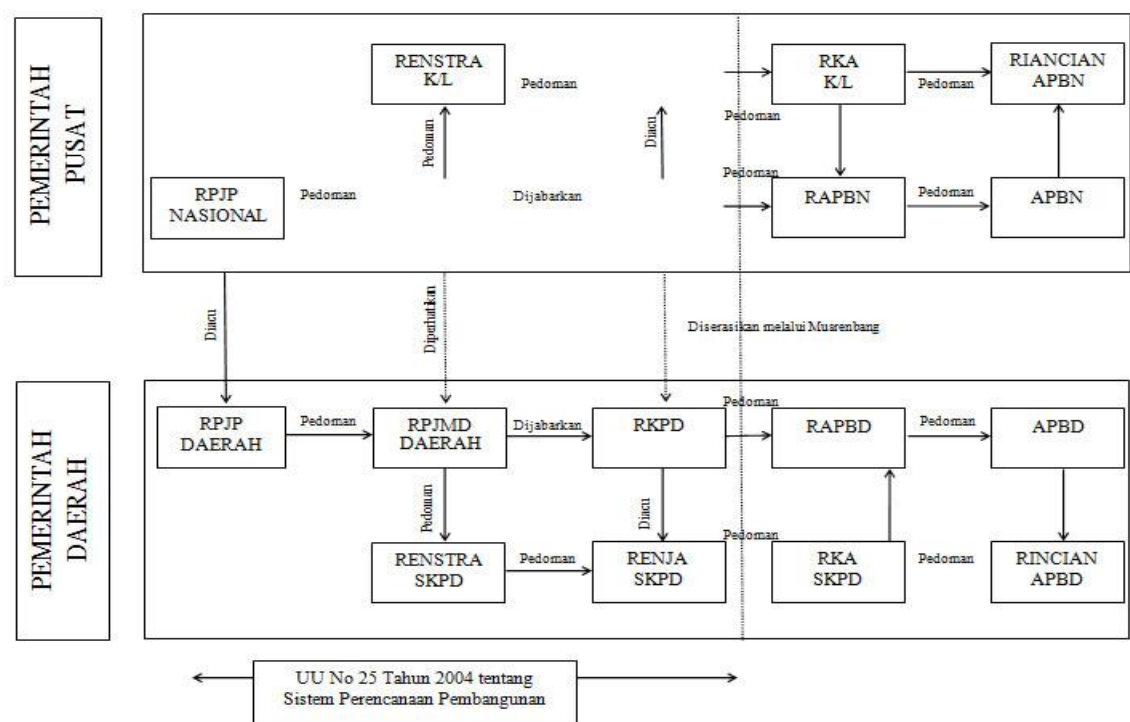
Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut Ini:



GAMBAR 1. 1 Tahapan Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (Lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat



GAMBAR 1. 2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan yang menjadi dasar dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota; (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 703);
11. Peraturan Wali kota Batam nomor 74 Tahun 2022 tentang RKPD 2023 (Berita Daerah Nomor Kota Batam Tahun 2022 Nomor 942);
12. Peraturan Wali Kota Batam nomor 93 Tahun 2022 Tentang renja setdako tahun 2023 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 961);
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 232 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Setdako Batam Tahun 2021-2026. (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1100);
14. Peraturan Wali Kota Batam nomor 82 tahun 2023 Tentang Perubahan RKPD Kota Batam tahun 2023 (Berita Daerah Kota Batam tahun 2023 Nomor 1192);
15. Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2024 Tentang RKPD Kota Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 1423)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 adalah untuk melaksanakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan prakiraan maju Tahun 2024 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan kedalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam adalah mendeskripsikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Batam dan Pelaksanaan program-program tersebut sesuai dengan yang diharapkan melalui fokus pada program-program prioritas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang:

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II: HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT s/d TRIWULAN II DAERAH TAHUN 2024

Bab ini memuat tentang:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.2 PERUBAHAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

3.3 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian SDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : PENUTUP

berisikan tentang:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 EVALUASI TERHADAP RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Batam. tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023.

APBD Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2023 Sebesar Rp. 244.977.314.277 terbagi menjadi 3 Program 19 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan sedangkan realisasi sebesar Rp. 192.139.508.685 dengan persentase realisasi sebesar 78.43%.

Untuk tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Batam mendapat alokasi dana sebesar Rp 257.877.793.635 dana tersebut dijabarkan dalam 3 program 19 Kegiatan dan 52 Sub kegiatan. Realisasi fisik dan keuangan (Triwulan II) sebesar Rp 82.605.723.267 dengan persentase realisasi capaian 32.03%

Dalam uraian tabel di bawah, disajikan kajian ulang (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 Semester pertama dan capaian tahun (2024) semester Pertama serta prediksi capaian target Rencana Kerja di tahun 2024 Semester Pertama.

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah mengacu pada hasil Laporan kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2023 dan/atau realisasi APBD tahun 2023 hingga realisasi APBD tahun 2024.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

TABEL 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam s/d Semester 1 Tahun 2024

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 (n-1)			TARGET TAHUN 2024	REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN TW II TAHUN 2024		TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	PERKIRAAN DAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN (2024)	
				TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100\%$	8	9	$\frac{10}{9/8} \times 100\%$	11	12	$13 = 12/11 \times 100\%$
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	80-90	60-70	70	100	70-80	Nilai Belum dikeluarkan	-	Nilai Belum dikeluarkan		Nilai Belum dikeluarkan
		2. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	5%	25	25	100	20	-	-	-	-	-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun					1 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	100%			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan evaluasi SKPD yang tersusun					1 Laporan	0 Laporan	100%			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan diberi Tunjangan di Lingkungan SKPD					215 Orang/Bulan	215 Orang/Bulan	100%			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
	Bimbingan Teknis, Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Implementasi Perundang- Undangan					20 Orang	4 Orang				
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50

		Umum Perangkat Daerah										
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan PerlengkapanKantor yang disediakan					7 Paket	3 Paket	42%			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					7 Paket	7 Paket	100%			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan					3 Paket	3 Paket	100%			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan					12 Laporan	6 Laporan	50 %			
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Terlaksana	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang diadakan					0 Unit	0 Unit	0%			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan					4 Paket	0 Unit	0%			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan					9 Unit	0 Unit	0 %			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	6 Laporan	50 %			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					12 Laporan	6 Laporan	50%			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sasaran Pelaksana Jasa Pelayanan Umum Kantor yang difasilitasi					12 Laporan	6 Laporan	50 %			
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6 Unit	6 Unit	100%			

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan					120 Unit	120 Unit	100%			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					10 Unit	9 Unit	90%			
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan					2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%			
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Bulan Penyediaan Dana Penunjang Operasional					2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%			
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terasilitasi sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Jenis Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan					8 Paket	6 Paket	100 %			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					8 Paket	6 Paket	100 %			
10	Penataan Organisasi	1. Persentase Jumlah SOP di lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan; 2. Persentase Jumlah PD yang memiliki PMPRB berkategori Baik; 3. Persentase Jumlah PD dengan nilai IKM berkategori Baik	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan, Maturitas kelembagaan dan evaluasi yang disahkan					4 Dokumen	1 Dokumen	25 %			
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah SOP, Prodis dan Aplikasi SPBE yang diterapkan					3 Laporan	1 Laporan	33.3%			

	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Rencana AKSI RB					44 Dokumen	43 Perangkat Daerah dan 1 RB	100%			
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan Publik dan Evaluasi Pelayanan Publik					1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan Pengukuran Kinerja yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Frekuensi Kegiatan Audiensi Kepala/ Wakil Kepala Daerah dan Persentase Tamu Kepala Daerah yang Difasilitasi					50 Laporan	37 Laporan	74%			
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					36 Laporan	27 Laporan	75%			
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan					2 Laporan	2 Laporan	100%			
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
		2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	80-90	60-70	70	100	70-80	50	50	50	50	50
		3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
		4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
12	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50

	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah rapat koordinasi					12 Dokumen	5 Dokumen	41%			
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah peserta sosialisasi administrasi kewilayahan					1 Dokumen	0 Dokumen	0%			
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen LPPD yang disusun					2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta Pelatihan Topik Keagamaan dan Jumlah Toko Keagamaan yang diberikan Insentif					24 Dokumen	6 Dokumen	25%			
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Keagamaan yang diberikan bantuan Hibah					250 Dokumen	144 Dokumen	57.6%			
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi					14 Dokumen	7 Dokumen	50 %			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					1068 Keluarga	416 Keluarga	39%			
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Yang Disusun					410 Dokumen	0 Dokumen	0%			

	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Perkara yang didampingi / jumlah perkara yang masuk x 100%					8 Kasus	6 Kasus	75%			
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi					410 Dokumen	0 Dokumen	0%			
15	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1. Persentase inisiasi Kerjasama yang menjadi MOU	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
		2. Jumlah kegiatan Pembangunan Daerah yang dibiaya oleh Dana CSR										
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Inisiasi MoU Kerjasama Daerah dalam Negeri					20 Dokumen	7 Dokumen	35%			
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri					1 Dokumn	0 Dokumen	0%			
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Frekuensi Rapat Koordinasi forum CSR					1 Laporan	0 Laporan	0%			
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
		2.Persentase Rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan	100	90	90	100	100	50	50	50	50	50
		3.Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa	80-90	60-70	70	100	70-80	Nilai Belum dikeluarkan	-	50	50	50
		4.Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50

16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Pengawasan BUMD dan BULD					6 Dokumen	2 Dokumen	33,33%			
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Frekuensi Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah					4 Laporan	2 Laporan	50%			
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah frekuensi rapat koordinasi dengan KUR dan UMKM					5 Dokumen	2 Dokumen	40%			
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	90	90	100	100	50	50	50	50	50
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah buku pedoman pelaksanaan kegiatan APBD yang disusun					1 Dokumen	0 Dokumen	0%			
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian Pembangunan					1 Laporan	0 Laporan	0%			
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan evaluasi pembangunan					2 Laporan	1 Laporan	50%			
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	80-85	Level 4 untuk 4 Variable	Level 4 untuk 4 Variable	100	70-75	65	87	Nilai Belum di Keluarkan	Nilai Belum di Keluarkan	Nilai Belum di Keluarkan
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket PBJ yang diproses					150 Dokumen	67 Dokumen	44.6%			

	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Paket yang diumumkan melalui LPSE					250 Dokumen	238 Dokumen	95.2%			
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek tentang PBJ					450 Orang	252 Orang	56%			
19	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100	100	100	100		50	50	50	50	50
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang dirumuskan					5 Dokumen	2 Dokumen	40%			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dirumuskan					5 Dokumen	2 Dokumen	40%			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Energi dan Air yang dirumuskan					5 Dokumen	2 Dokumen	40%			

TABEL 2. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Sampai dengan Triwulan II Kota Batam

INDIKATOR KINERJA	SPM/ STANDART NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			TAHUN N-2	TAHUN N-1	TAHUN N	TAHUN N+1	TAHUN N-2	TAHUN N-1	TW II TAHUN N	TAHUN N	TAHUN N+1	
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	TW II 2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nilai LPPD				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Nilai belum di keluarkan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian				89%	90%	91%		88.31%	Nilai belum di keluarkan	90%	91%	
Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah				70-80	70-80	80-90		70-80	25%	70-80	80-90	
Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB				20%	15%	10%		20%	-	15%	10%	
Nilai SAKIP				B	BB	BB		B	Nilai belum di keluarkan	BB	BB	
Persentase Produk Hukum yang ditetapkan				100%	100%	100%		100%	25%	100%	100%	
Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan				70-80	70-80	80-90		70-80	25%	70-80	80-90	

Rakyat												
Persentase Rekomendasi Kebijakan Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti				100%	100%	100%		100%	25%	100%	100%	
Persentase MoU yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%		100%	25%	100%	100%	
Persentase penerapan SOP di Lingkungan Pemerintah Kota Batam				90%	95%	100%		85%	80%	95%	100%	
Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perikanan				100%	100%	100%		100%	25%	100%	100%	
Persentase Rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan				100%	100%	100%		89.01%	-	100%	100%	
Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa				70-80	70-80	80-90		-	25%	70-80	80-90	
Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang				100%	100%	100%		100%	25%	100%	100%	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Batam, maka telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Batam.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat Daerah Kota Batam melalui bagian-bagian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kota Batam dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi Walikota Batam yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance dan clean government yang Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

1.1 PERUBAHAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Ada beberapa Sub Kegiatan yang mengalami Pengurangan Pagu Indikatif di karenakan terjadi Rasionalisasi kebutuhan di Perangkat Daerah, diantara Sub tersebut sebagai berikut

TABEL 3. 1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH				246.777.037.619	257.877.795.635	
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	70-80%	70-80%	134.665.933.519	122.932.976.035	
				2. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	15%	15%			
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	301.348.000	196.679.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	143.409.000	94.900.000	Pengurangan Belanja Modal

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	157.939.000	101.779.000	Pengurangan Belanja Modal
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	45.105.655.929	43.240.130.104	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/Bulan	215 Orang/Bulan	45.105.655.929	43.240.130.104	Pengurangan ASN
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	258.986.000	227.295.000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	20 Orang	258.986.000	227.295.000	Pengurangan Peserta Bimtek
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	20.854.251.500	20.786.674.500	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	4.162.918.000	3.562.668.000	Pengurangan Belanja Modal

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	7 Paket	9.046.946.000	10.477.327.500	Penambahan Belanja Konsumsi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	981.000.000	654.450.000	Pengurangan Sewa Fotocopy
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.663.387.500	6.092.229.000	Pengurangan SPPD MTQ Tk Provinsi
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Terlaksana	100%	100%	3.622.598.000	450.852.000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	5 Unit	2.405.050.000	0	Pengurangan Anggaran
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	115 Paket	4 Paket	295.908.000	81.750.000	Pengurangan Anggaran
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	50 Unit	9 Unit	921.640.000	369.102.000	Pengurangan Belanja Modal
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	24.921.551.692	19.301.087.600	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.505.630.000	9.076.030.000	Pengurangan Belanja Listrik

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	12 Laporan	773.500.000	722.200.000	Pengurangan Peralatan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.642.421.692	9.502.857.600	Pengurangan Tenaga Honorer
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100%	100%	25.316.412.556	25.714.994.950	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	351.760.000	351.760.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	120 Unit	16.768.503.750	16.719.707.650	Pengurangan Penyesuaian SSH
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	8.196.148.806	8.643.527.300	Penambahan Pemeliharaan Lift

8		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	100%	100%	5.740.127.042	6.088.583.081	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	3.955.127.042	4.303.583.081	Penambahan Gaji KDH
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang / Bulan	1.785.000.000	1.785.000.000	
9		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi sesuai ketentuan	100%	100%	4.802.845.800	4.802.845.800	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	2.701.484.400	2.701.484.400	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	2.101.361.400	2.101.361.400	
10		Penataan Organisasi	Penataan Organisasi	1.Persentase Jumlah SOP di lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan;	100%	100%	2.126.602.000	1.649.313.000	

				2.Persentase Jumlah PD yang memiliki PMPRB berkategori Baik					
				3. Persentase Jumlah PD dengan nilai IKM berkategori Baik					
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen	471.863.000	296.223.000	Pengurangan Sewa Ruangan
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan	416.706.000	415.826.000	Pengurangan Sewa Ruangan
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	44 Dokumen	131.854.000	48.199.000	Pengurangan Sewa Ruangan
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	886.749.000	773.667.000	Pengurangan Sewa Ruangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	219.430.000	115.398.000	Pengurangan Sewa Ruangan
11		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	1 Dokumen	100%	791.975.000	474.521.000	
				Jumlah Pendokumentasian tugas pimpinan	2 Laporan				

				Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang di fasilitasi sesuai ketentuan	100%				
		Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	50 Laporan	598.175.000	298.275.000	Pengurangan Belanja Pakaian
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	36 Laporan	181.450.000	175.258.000	Pengurangan Penyesuaian SSH
		Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	2 Laporan	2 Laporan	12.350.000	988.000	Pengurangan Penyesuan SSH
II	UNSUR SEKRETARIA T DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	100%	100%	106.518.041.000	133.512.286.400	
				2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	80-90%	70-80%			
				3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	100%	100%			
				4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti	100%	100%			
1		Administrasi Tata Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu	100%	100%	7.884.039.500	7.469.942.400	

		Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.599.994.000	2.158.754.000	Pengurangan Pisah Sambut Forkopimda
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Kecamatan Perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.020.429.500	172.968.000	Pengurangan Kegiatan Perbatasan
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.263.616.000	5.327.642.400	Penambahan Belanja Konsumsi
2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	100%	100%	97.435.530.400	121.837.663.000	
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	24 Dokumen	61.010.026.000	81.759.981.000	Penambahan Insentif Keagamaan

		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200 Dokumen	250 Dokumen	22.435.260.000	27.010.260.000	Penambahan Belanja Hibah
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	14 Dokumen	11.764.327.400	12.161.208.000	Penambahan Penunjang Kegiatan MTQ Provinsi
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1440 Keluarga	1068 Keluarga	2.225.917.000	906.214.000	Pengurangan Keluarga peserta Fardu Kipayah

3		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasikan	100%	100%	371.385.000	715.031.000	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	410 Dokumen	410 Dokumen	9.815.000	9.815.000	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	8 Kasus	350.174.000	693.820.000	Penambahan Honorarium Beracara
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	410 Dokumen	410 Dokumen	11.396.000	11.396.000	
4		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	100%	4.822.360.000	3.489.650.000	
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	20 Dokumen	4.783.210.000	3.486.550.000	Pengurangan {enyesuaian SSH
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	1.550.000	1.550.000	
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	37.600.000	1.550.000	Pengurangan Belanja Cetak
III	UNSUR SEKRETARIA DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian	100%	100%	1.597.789.200	1.432.533.200	
				Persentase Rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan	100%	100%			

				Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa	100%	100%			
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	100%	100%			
1		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	555.348.000	618.108.000	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	6 Dokumen	95.974.000	158.734.000	Penambahan Kajian BUMD
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	370.610.000	370.610.000	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	5 Dokumen	88.764.000	88.764.000	
2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	311.621.000	129.341.000	
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	109.450.000	105.650.000	Pengurangan Barang Jasa

		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	190.945.000	12.465.000	Pengurangan Tenaga Ahli
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	11.226.000	11.226.000	
3		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	4 Level untuk 4 Variabel	80%	690.535.200	647.234.200	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400 Dokumen	150 Dokumen	20.545.000	20.545.000	Penambahan Belanja Modal
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen	250 Dokumen	562.543.200	569.008.200	Penambahan Varang dan Jasa
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	450 Orang	107.447.000	57.681.000	Pengurangan Barang dan Jasa
4		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	100%	40.285.000	37.850.000	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian,	5 Dokumen	5 Dokumen	14.300.000,00	13.590.000	Pengurangan Belanja Cetak

		Kelautan, dan Perikanan	dan Perikanan	Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	5 Dokumen	12.435.000	11.825.000	Pengurangan Belanja Cetak
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	5 Dokumen	13.550.000	12.435.000	Pengurangan Belanja Cetak

1.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan adalah Usulan program dan kegiatan 2024 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tahapan visi Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermatabat. Jabaran visi tersebut harus dilakukan secara terukur dan terarah yang diimplementasikan dengan program kegiatan untuk pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir.

Pada tahun 2024 diusulkan 3 program 19 kegiatan dan Sub Kegiatan 52 dengan kebutuhan dana indikatif sebesar Rp. 257.877.793.635

dengan sumber dana murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam, usulan lengkap tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

TABEL 3. 2

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						C. Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an					Tolok Ukur	Target	
					SEKRETARIAT DAERAH								257.877.795.635,00					250.416.925.492,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								257.877.795.635,00					250.416.925.492,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								257.877.795.635,00					250.416.925.492,00	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								122.932.976.035,00					150.196.160.494,00	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								196.679.000,00					249.585.961,00	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	1 Dokumen	100 %	94.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	153.910.161,00	
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	1 Laporan	100 %	101.779.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	95.675.800,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								43.240.130.104 ,00					51.562.239.785,00
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	215 Orang/bulan	100 %	43.240.130.104 ,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/bulan	51.123.952.109,00
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								227.295.000 ,00					1.649.768.756,00
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	20 Orang	100 %	227.295.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	861.258.756,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								20.786.674.500 ,00					16.732.950.093,00

4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralata n dan Perleng kapan Kantor yang Disediak an	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	7 Paket	100 %	3.562.668.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	7 Paket	3.480.865.000,00	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediak an	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	7 Paket	100 %	10.477.327.500 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	4.210.313.057,00	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggan daan yang Disediak an	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	3 Paket	100 %	654.450.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan	1 Paket	782.867.536,00	

						Sekretariat Daerah												
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	12 Laporan	100 %	6.092.229.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.258.904.500,00
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							450.852.000 ,00						9.491.294.921,00
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	4 Paket	100 %	81.750.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	115 Unit	1.549.222.861,00
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	9 Unit	100 %	369.102.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	5.709.650.209,00

						Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	yang Disediak an	Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana										
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							19.301.087.600,00						28.581.182.941,00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	12 Laporan	100 %	9.076.030.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.244.295.619,00
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Peralata n dan Perleng kapan Kantor yang Disediak an	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	12 Laporan	100 %	722.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengka n Kantor yang Disediakan	6 Laporan	4.380.598.670,00
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	12 Laporan	100 %	9.502.857.600 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.956.288.652,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								25.714.994.950 ,00					25.706.905.556,00
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	6 Unit	100 %	351.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	351.760.000,00
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasi	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	- Kota Batam, Semua Kecamatan,	15 % 70-80 %	120 Unit	100 %	16.719.707.650 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	120 Unit	16.098.251.750,00

						Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	onal atau Lapanga n yang Dipeliha ra dan dibayark an Pajak dan Perizina nnya	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	Semua Kel/Desa							atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a		
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangun an Lainnya yang Dipeliha ra/Direh abilitasi	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	10 Unit	100 %	8.643.527.300 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	10 Unit	9.256.893.806,00
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							6.088.583.081 ,00						6.281.014.862,00
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat	Jumlah Orang yang Meneri ma Gaji dan Tunjang an Kepala Daerah dan	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	2 Orang/Bula n	100 %	4.303.583.081 ,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bul an	3.947.409.177,00

						Daerah	Wakil Kepala Daerah	ketentuan										
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Meneri ma Dana Penunja ng Operasi onal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	2 Orang/Bula n	100 %	1.785.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bul an	2.333.605.685,00
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							4.802.845.800,00						4.661.997.212,00
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Paket Kebutuh an Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediak an	Persentase Kegiatan Kerumahtang gaan Sekretariat Daerah Yang Terfasilitasi Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	8 Paket	100 %	2.701.484.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	2.652.383.777,00
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													

						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Yang Terasilitasi Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	8 Paket	100 %	2.101.361.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	2.009.613.435,00
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi							1.649.313.000 ,00						2.637.930.600,00
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Dokumen Pengelolan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	4 Dokumen	100 % 100 % 100 %	296.223.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaa n dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	710.891.100,00
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana													

						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	3 Laporan	100 % 100 % 100 %	415.826.00,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	651.410.600,00
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	44 Dokumen	100 % 100 % 100 %	48.199.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	195.211.600,00
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Monitoring,	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua	70-80 % 15 %	1 Dokumen	100 % 100 % 100 %	773.667.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalia	1 Dokumen	788.694.100,00

						Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Evaluasi dan Pengan- dalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	Kel/Desa							n Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah													
						Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah PD dengan nilai IKM Berkategori Baik Jumlah PD Yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik Jumlah Sop Dilingkungan Pemkot Batam Yang Diterapkan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 15 %	1 Dokumen	100 % 100 % 100 %	115.398.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	291.723.200,00
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								474.521.000 ,00					2.641.289.807,00
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah Yang Difasilitasi Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	50 Laporan	100 %	298.275.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	2.016.440.000,00

						Administrasi Umum Sekretariat Daerah												
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah Yang Difasilitasi Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	36 Laporan	100 %	175.258.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	500.421.807,00
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
						Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Pendok umentasian Tugas Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah Yang Difasilitasi Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 % 70-80 %	2 Laporan	100 %	988.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pendokume ntasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	124.428.000,00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								133.512.286.400,00					97.222.466.954,00
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan								7.469.942.400 ,00					7.559.986.635,00
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan													
						Persentase MoU yang	Jumlah Dokume	Persentase Penyampaian	- Kota Batam,	100 % 70-80 %	12 Dokumen	100 %	1.969.332.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Jumlah Dokumen	12	2.933.353.824,00

						ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan	n Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %				(PAD)		Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan													
						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti Persentase	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Penyampaian Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	172.968.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahannya	1 Dokumen	850.703.377,00

						Produk Hukum yang Ditetapkan												
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah													
						Persentase MoU yang ditindaklanj uti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahtera an Rakyat Persentase rekomendas i kebijakan tata pemerintah an yang ditindaklanj uti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan	Jumlah Dokume n Hasil Fasilitasi Pelaksa naan Otonom i Daerah	Persentase Penyampaian Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	2 Dokumen	100 %	5.327.642.400 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	3.775.929.434,00
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							121.837.663.000 ,00						83.862.031.363,00
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual													

						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	24 Dokumen	100 %	81.759.981.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	43.436.051.937,00
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial													
						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Persentase rekomendasi kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	250 Dokumen	100 %	27.010.260.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi,	200 Dokumen	23.287.155.000,00

						tata pemerintah an yang ditindaklanj uti	Sosial, Transmi grasi, Kesehat an, Pember dayaan Peremp uan dan Perlindu ngan Anak, Adminis trasi Kepend udukan Dan Pencata tan Sipil, Pember dayaan Masyara kat dan Desa, Pengen dalian Pendud uk dan KB									Kesehatan, Pemberday aan Perempuan dan Perlindunga n Anak, Administrasi Kependudu kan Dan Pencatatan Sipil, Pemberday aan Masyarakat dan Desa, Pengendalia n Penduduk dan KB		
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat													

						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	14 Dokumen	100 %	12.161.208.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	14.750.668.426,00
4	01	02	2.02	0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat													

						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	1068 Keluarga	100 %	906.214.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1440 Keluarga	2.388.156.000,00
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								715.031.000 ,00					595.625.099,00
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah													
						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Indeks Kepuasan Layanan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Persentase Produk Hukum Yang Telah Diharmonisasi Dan Disinkronisasi kan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 70-80 % 100 %	410 Dokumen	100 %	9.815.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	410 Dokumen	1.749.436,00

						Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti												
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum													
						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum Yang Telah Diharmonisasi Dan Disinkronisasikan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 70-80 % 100 %	8 Kasus	100 %	693.820.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	8 Kasus	591.817.993,00
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum													

						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Persentase Produk Hukum Yang Telah Diharmonisasi Dan Disinkronisasi	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 70-80 % 100 %	410 Dokumen	100 %	11.396.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	410 Dokumen	2.057.670,00
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah								3.489.650.000 ,00					5.204.823.857,00
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri													
						Persentase MoU yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	20 Dokumen	100 %	3.486.550.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	4.783.434.000,00

						an yang ditindaklanj uti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan												
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri													
						Persentase MoU yang ditindaklanj uti ndeks Kepuasan Layanan Kesejahtera an Rakyat Persentase rekomendas i kebijakan tata pemerintah an yang ditindaklanj uti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan	Jumlah Dokume n Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	1.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	322.144.092,00
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama													

						Persentase MoU yang ditindaklanjuti indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi kebijakan tata pemerintahan yang ditindaklanjuti Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	1.550.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	99.245.765,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								1.432.533.200 ,00					2.998.298.044,00
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								618.108.000 ,00					776.167.752,00
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD													
						Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Ditindak lanjuti	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 70-80 %	6 Dokumen	100 %	158.734.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	213.232.331,00

						persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	aan BUMD dan BLUD											
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
						Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Ditindaklanjuti	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 70-80 %	4 Laporan	100 %	370.610.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	519.750.240,00

4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil													
						Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian dan Persentase rekomendasi i layanan kebijakan administrasi pembangunan persentase rekomendasi i kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Ditindak lanjuti	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 70-80 %	5 Dokumen	100 %	88.764.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	43.185.181,00
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							129.341.000 ,00						363.972.322,00
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													

						Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	105.650.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	109.755.000,00
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													

						Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	1 Laporan	100 %	12.465.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	190.800.000,00
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													

						Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengelol aan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu Dan Sesuai Ketentuan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 70-80 % 100 % 100 %	2 Laporan	100 %	11.226.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	63.417.322,00
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								647.234.200 ,00					1.783.925.248,00
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													

						Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 70-80 % 100 %	150 Dokumen	75-80 %	20.545.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400 Dokumen	139.382.819,00
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
						Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Indeks Tata Kelola Pengadaan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 70-80 % 100 %	250 Dokumen	75-80 %	569.008.200 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 Dokumen	1.327.200.346,00

						an indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa persentase rekomendas i kebijakan bidang SDA yang ditindaklanj uti												
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													
						Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomia n Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Jumla h Orang yang Mengi kuti Pemb inaan dan Advok asi Penga daan Baran g dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 70-80 % 100 %	450 Orang	75-80 %	57.681.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	317.342.083,00

4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							37.850.000 ,00						74.232.722,00
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan													
						indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 100 % 100 % 100 %	5 Dokumen	100 %	13.590.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	23.548.515,00
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup													

						indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 100 % 100 %	5 Dokumen	100 %	11.825.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	25.463.620,00
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air													
						indeks kepuasan layanan pengadaan barang jasa persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti	- Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70-80 % 100 % 100 %	5 Dokumen	100 %	12.435.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,	5 Dokumen	25.220.587,00

						ditindaklanjuti Persentase rekomendasi layanan kebijakan administrasi pembangunan Persentase rekomendasi kebijakan layanan perekonomian	Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan									Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		
TOTAL												257.877.795.635 ,00						250.416.925.492,00

Sumber Dana

Adapun sumber dana dari keseluruhan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Batam untuk menjalankan program dan kegiatan bersumber dari dana APBD Kota Batam. Sekretariat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai 3 (tiga) program yang telah dispesifikasi yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Dengan pelaksanaan ketiga program ini, maka diharapkan dapat terpenuhi pendanaan dari APBD Kota Batam.

Demikian secara keseluruhan perolehan dana yang diharapkan untuk dapat mencapai kinerja yang berkesinambungan dan berorientasi pada hasil kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Batam.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam yang memuat kebijakan program dan kegiatan yang diarahkan pada sasaran dan tujuan dengan mengacu pada visi misi Sekretariat Daerah Kota Batam. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kegiatan.
 - a. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam.
 - b. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
 - c. Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai, sumber dana dan sarana prasarana yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi .
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah Kota Batam berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Batam Tahun 2023
 - b. Sekretariat Daerah Kota Batam berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat

Daerah Kota Batam Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2023 dan RKPD Kota Batam Tahun 2024.

- c. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 diwajibkan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi program kegiatan pada tahun 2023, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui langkah-langkah/solusi yang tepat untuk memperbaiki permasalahan yang ada.
 - d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
3. Rencana tindak lanjut

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 dipengaruhi juga oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2024 diharapkan dapat dijadikan acuan pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.